

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan yaitu Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat DPRD Kota Bandung, peneliti mengemukakan simpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Strktur Birokrasi berpengaruh secara positif dan signifikan Terhadap Kualitas Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat DPRD Kota Bandung.

Dengan demikian hipotesis yang peneliti ajukan teruji secara empirik, karena variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah memberi pengaruh terhadap melalui dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Strktur Birokrasi

Pengaruh yang kuat antara Implementasi Kebijakan Pemerintah dengan Kualitas Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat DPRD Kota Bandung serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan pada konsep Kualitas Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat DPRD Kota Bandung. Selain itu, dari hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh lain yang cukup besar dari variabel lain selain variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah yang turut

mempengaruhi terhadap Kualitas Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat DPRD Kota Bandung

### **5.2.1 Saran**

#### **1. Saran Akademis**

Hasil ini disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan menghubungkan variabel atau dimensi-dimensi selain Implementasi Kebijakan, sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian Kebijakan Publik

#### **2. Saran Praktis :**

- a) Disarankan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi seaku pejabat yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi kepada publik lebih meningkatkan sarana dan prasarana agar informasi dan dokumentasi yang dipublikasikan kepada publik lebih akurat dengan data-data yang terbaru.
- b) Disarankan Kepada Kepala Bagian Humas di Sekretariat DPRD Kota Bandung untuk menambah SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang memiliki keahlian khusus dibidang IT, agar informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui website atau kotak layanan yang berada di Sekretariat DPRD Kota Bandung dapat terpenuhi sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

c) Disarankan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selaku pejabat yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi kepada publik lebih meningkatkan komitmen untuk menyampaikan informasi tepat waktu sesuai dengan permintaan dengan data-data yang lebih lengkap dan mudah diakses oleh pengguna layanan.